



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jl.Merapi,beran,Sleman KAB. SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<http://pn-sleman.go.id>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,86 / 96,50%

Jumlah	147 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 75 PEREMPUAN : 72	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 1
	SD : 1	Diploma 3 : 5
	SMP : 0	S1 : 60
	SMU : 68	S2 : 11
	Diploma 1 : 0	S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 10	SWASTA : 20
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 8
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 3
	LAINNYA : 106	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,667 |
| 2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 3,762 |
| 3. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? | 3,782 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.1. Indikator Transparansi Biaya

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,667 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik atau tidak pernah menerima maupun meminta tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah pertama sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

Publikasi Surat Keputusan tentang Biaya Perkara di Website, PTSP serta penjelasan dari petugas di setiap layanan yang terkait biaya pelayanan. Terhadap pelayanan pada unsur biaya/tarif tetap berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Klas IA nomor: W13.U2/1781/HK.02/IV/2022 tentang Taksiran Panjar Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman, dan Biaya PNBP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2. Indikator Manipulasi Peraturan

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,762 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik dan tidak ada manipulasi peraturan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah kedua sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

Dalam setiap pelaksanaan pelayanan agar tetap sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing serta tahapan-tahapan sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku.

3. Indikator Hadiah/ tanda terima kasih

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah/ tanda terima kasih ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,782 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik atau tidak pernah menerima maupun meminta tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah ketiga sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

Dihimbau agar tidak menerima maupun meminta tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada pengunjung layanan atau informasi. Sosialisasi besaran Biaya pelayanan dengan publikasi Biaya perkara melalui kemudahan akses Website, Aplikasi Ampyang, Hot Line Service untuk mengakses biaya / tarif yang berlaku di Pengadilan Negeri Sleman, semua biaya layanan sesuai surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Sehingga Pengguna layanan tidak perlu memberikan tanda terimakasih karena mengetahui pelayanan yang tanpa dipungut biaya atau ada biaya resmi.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

12 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri